

Mitra atau Kompetitor?

Oleh Alex Sobur

Simaklah isi surat-surat kabar kita beberapa hari terakhir ini. Bisa dipastikan, hampir setiap tahun, saat-saat menjelang atau bertepatan dengan pengumuman ujian Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), banyak iklan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bermunculan. Banyak iklan atau promosi PTS yang dipajang atau dipampang di jalan-jalan raya lewat spanduk. Ada yang ditayangkan melalui televisi swasta. Ada yang diudarakan lewat perantaraan radio. Ada juga dengan cara mengirimkan brosur ke SMA-SMA, madrasah-madrasah aliyah, mal-mal, bahkan juga ke rumah-rumah calon mahasiswa.

Apa yang dilakukan itu pada dasarnya berusaha untuk menarik minat jebolan SLTA yang tidak kebagian jatah masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Terlepas dari bagaimana kiat para pengelola PTS menyaring atau "menjaring" lulusan SLTA "kelas dua"—mengingat "kelas satu"-nya sudah diambil PTN, tampaknya kita tetap sepakat, gagal memasuki PTN, PTS jadi alternatif, meski ada juga calon mahasiswa sementara yang langsung mengambil program studi di PTS tertentu, yang mereka anggap berkualitas.

Sebutan PTS sebagai mitra PTN selama ini, sebetulnya mengandaikan kesamaan pengakuan. Jika kita menyimak berbagai peraturan Mendiknas dan Dirjen Dikti yang dikeluarkan selama ini, bisa diduga, peraturan-peraturan yang tengah disiapkan di tingkat menteri dan dirjen akan lebih menggarisbawahi dan mencerminkan political will pemerintah, yakni berkembangnya pola tunggal dalam pendidikan bangsa kita. Kemitraan antara PTN dan PTS akan lebih dikembangkan, dan batas antara PTN dan PTS akan menjadi lebih samar.

Ditinjau dari segi kepentingan nasional, batas pemisah antara PTN dan PTS yang kian menipis ini justru menunjukkan tingkat kemajuan yang telah kita capai sejak kemerdekaan. Awalnya, memang terasa sulit, terutama bagi PTN, untuk menerima kenyataan bahwa hubungan PTN dengan PTS yang semula bagaikan "kakak" dan "adik" dan bersifat subordinatif ini, sedikit demi sedikit berubah menjadi koordinatif, dan bahkan tidak mustahil suatu saat kedua mitra ini harus bersaing hingga masing-masing menjadi unggul.

Idealnya memang lulusan PTS itu dinilai sama dengan lulusan PTN. Apa yang diperoleh negeri juga diperoleh swasta, apalagi yang mereka didik juga sama-sama warga negara Indonesia. Namun nilai ideal ini menjadi utopis, sebab dari hakikatnya masing-masing jelas berbeda. PTN didirikan dan dibiayai atau disubsidi negara dengan kekhasan sendiri. PTS didirikan dan dibiayai dengan kekhasan kewastaan masing-masing. Variasi sifat-sifat khas itulah ciri yang menandai keberadaan PTS di Indonesia, mulai dari yang berlatar belakang keagamaan, nasionalisme, atau pun pendidikan umum. Sebaliknya, kekhasan yang dimiliki PTN adalah umum.

Salah satu hal penting dari semua kondisi yang mesti ditata ulang adalah terdapatnya ketimpangan antara hak dan kewajiban PTS dengan pemerintah. Peraturan-peraturan tentang syarat pendirian atau pembukaan program studi baru, akreditasi, dan pengelolaan perguruan tinggi, hingga sekarang lebih banyak dibuat untuk mengikat PTS saja. PTS pula yang selama ini memiliki banyak kewajiban terhadap pemerintah.

Di pihak lain, ketentuan yang mengikat pemerintah, seperti jangka waktu maksimal mengeluarkan izin pendirian perguruan tinggi yang memenuhi syarat, hak perguruan tinggi untuk memperoleh pembinaan dari pemerintah, belum pernah ada. Seolah-olah hanya perguruan tinggi yang memiliki kewajiban kepada pemerintah, sedangkan pemerintah sama sekali tidak memiliki kewajiban terhadap perguruan tinggi.

Alasan perlunya kontrol adalah karena adanya ketakutan akan merosotnya mutu pendidikan yang kerap dikemukakan guna mencegah PTS melaksanakan sistem ini sangat lemah. Sebenarnya, persoalan perluasan kesempatan dan persoalan peningkatan mutu pendidikan pada hakikatnya bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan bersama-sama sepanjang dilaksanakan dengan upaya-upaya rasional dan sistematis.

Sehubungan dengan soal pembinaan PTS, terutama dikaitkan dengan tujuan tercapainya pola tunggal antara PTN dengan PTS, pemerintah seyogianya lebih bertoleransi dan bertindak baik terhadap PTS maupun PTN. Misalnya saja dengan memberikan jangka waktu tertentu yang cukup panjang dalam melaksanakan peraturan yang baru. Sebab, selama ini banyak PTS sering dibuat kelabakan, bahkan nyaris tak berdaya setiap menerima peraturan baru yang begitu keluar begitu diberlakukan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, PTS sesungguhnya berpeluang untuk maju. Karena status swastanya, PTS jelas lebih leluasa mengelola lembaganya. Ia bisa menghindari aturan-aturan yang bersifat menghambat. Berbagai keputusan mengenai gaji, misalnya, atau insentif penelitian, dan sebagainya, dapat diambil dengan cepat tanpa harus memikirkan implikasinya secara nasional. Ia bisa membuat kebijakannya sendiri sehingga lebih demokratis, lebih bisa mengarahkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan program internal (nilai politik). Dan juga karena swasta, PTS bisa lebih dekat kepada masyarakat, bisa melaksanakan program timbal balik antara PTS dengan masyarakat. Akhirnya, PTS dapat memberikan apa yang diperlukan masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan input kepada PTS. PTS dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan posisi sejajar dengan masyarakat (nilai sosial). PTS sebagai lembaga swasta lebih mudah mencari mitra pasangan, atau mengembangkan sumber dana untuk menopang pembiayaan (nilai ekonomi).

Sudah barang tentu, diperlukan banyak syarat bagi PTS dalam upaya mencapai keberhasilannya. Di antara sekian banyak syarat tersebut, dua syarat utama atau terpenting adalah: pertama, pengelolaan secara profesional; dan kedua, dukungan yang fasilitatif dari pelaksana pemerintah di lapangan.

Pengelolaan profesional akan menjamin terciptanya PTS yang memiliki manajemen akademik dan administratif yang rapi, tenaga pengajar yang berkualifikasi formal tinggi, kebijaksanaan yang mendukung perkembangan mutu dosen atau tenaga pengajar dan mahasiswa, visi jauh ke depan yang berorientasikan hanya pada kemajuan akademik, fasilitas penunjang perkuliahan yang memadai, kegiatan penelitian yang terprogram, anggaran perpustakaan yang cukup, dan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi seluruh karyawan.

Selebihnya, faktor lain yang memengaruhi PTS adalah bagaimana political will pemerintah mengenai pola tunggal dan pendidikan nasional ini diterapkan di lapangan, sebab, seperti pernah dikemukakan Soenjono Dardjowidjojo (1991), kalau sudah sampai pada masalah penerapan peraturan di lapangan, soal teknis kecil-kecilan yang banyak pegang peranan.***

Penulis, dosen Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba); asesor Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Program Studi Ilmu Komunikasi.

Sumber:

<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=86258>